

**KESIAPAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA PEMERINTAHAN DESA
BERBASIS *WEBSITE* (Studi Perbandingan Desa Margototo dan Desa Margosari
Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)**

(Skripsi)

Oleh

ADERIA ERNANDA

2016021016



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

KESIAPAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA PEMERINTAHAN DESA BERBASIS *WEBSITE* (Studi Perbandingan Desa Margototo dan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

ADERIA ERNANDA

Perkembangan teknologi informasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, oleh karena itu pemerintah menyesuaikan dengan adanya perkembangan ini berinovasi memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi atau disebut juga dengan *E-Government*. Pada pelaksanaannya inovasi ini masih ditemukan belum berjalan maksimal pada tingkat pemerintahan desa karena seringkali dalam pelaksanaan mengalami ketidaksiapan terutama pada sumber daya. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan penerapan *E-Government* pada pemerintahan desa berbasis *websitedi* Desa Margototo dan Desa Margosari yang dilihat dari sisi pemerintah dan sisi Masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif, metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, menggunakan teori *E-Readiness* yaitu Sistem Data, Landasan Hukum, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Teknologi, dan Kepemimpinan serta pemikiran yang strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Margototo siap pada satu indikator yaitu infrastruktur teknologi yang sudah dipersiapkan sedangkan untuk 5 indikator lainnya belum siap. Pada Pemerintah Desa Margosari siap pada 3 indikator yaitu sistem data, Sumber Daya Manusia, dan Kepemimpinan serta pemikiran yang strategis. Sementara itu permasalahan yang sama terlihat pada Indikator Landasan Hukum dan Kelembagaan yang menjadi hambatan cukup besar karena peraturan yang kurang berpihak pada desa-desa yang mengembangkan *E-Government* secara mandiri serta kurang efisiennya unit yang mengkoordinir penerapan *E-Government* pada tingkat Pemerintah Desa.

Kata kunci: Kesiapan, Pemerintahan Desa, *E-Government*.

ABSTRACT

READINESS FOR E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN VILLAGE GOVERNMENTS BASED ON WEBSITES (A Comparative Study of Margototo Village and Margosari Village, Metro Kibang District, East Lampung Regency)

By

ADERIA ERNANDA

The development of information technology is an inevitable aspect. Therefore, governments adjust to this development by innovating to provide effective and efficient services utilizing information technology, also known as E-Government. However, in its implementation, this innovation is often found not to be fully maximized at the village government level because it frequently experiences readiness issues, especially concerning resources. Therefore, this research aims to determine the readiness for E-Government implementation in village governments based on websites in Margototo Village and Margosari Village, from both the government and community perspectives. In this study, a qualitative research type with a comparative approach was used, employing data collection methods such as interviews, observations, and documentation. The study used the E-Readiness theory, which included Data Systems, Legal Foundations, Institutional Framework, Human Resources, Technological Infrastructure, Leadership, and Strategic Thinking. The research results indicate that Margototo Village Government is ready in one indicator, which is technological infrastructure, while it is not ready in the other five indicators. On the other hand, Margosari Village Government is ready in three indicators: data systems, human resources, and leadership, including strategic thinking. However, similar issues arise in the Legal Foundations and Institutional Framework indicators, posing significant barriers due to regulations that are not supportive of villages independently developing E-Government and the inefficiency of units coordinating E-Government implementation at the village government level.

Key words: Readiness, Village Government, E-Government.

**KESIAPAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA PEMERINTAHAN
DESA BERBASIS *WEBSITE* (Studi Perbandingan Desa Margototo dan Desa
Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh

ADERIA ERNANDA

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANAN ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **KESIAPAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA PEMERINTAHAN DESA BERBASIS *WEBSITE* (Studi Perbandingan Desa Margototo dan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **Aderia Ernanda**

No. Pokok Mahasiswa : **2016021016**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.
NIP. 19810601201012003


Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.
NIP. 199009182024212001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.**

Sekretaris : **Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.**

Penguji Utama : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **07 Mei 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 April 2024
Yang Membuat Pernyataan



Aderia Ernanda
NPM. 2016021016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aderia Ernanda yang lahir di Dusun Sukarame, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada 08 Maret 2002 anak ke empat dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari Bapak Ujang Suhadi dan Ibu Marwati. Penulis memiliki 3 Kakak Perempuan bernama Novi Anggana Dewi, Devi Ernanda Sagita, dan Riska Agnes Suhadi.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak yang diselesaikan di Raudhatul Athfal (RA) Raudhatul Jannah pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 2 Haduyang pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP YBL Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung Melalui jalur seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan di terima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung penulis mengikuti kegiatan akademik dan non akademik untuk menunjang kapasitas diri dengan mengikuti kegiatan sebagai Legislator Muda Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat Universitas di Universitas Lampung pada tahun 2021, memasuki tahun 2022 Penulis terdaftar sebagai Anggota Organisasi Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Lampung di bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM). Selain itu, penulis sempat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Tahun 2023 di

Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya, penulis juga mengikuti kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Penelitian/Riset pada tahun 2023 di Desa Margototo dan Desa Margosari di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur selama 6 Bulan.

Demikianlah segelintir aktivitas penulis sejak 2020 hingga 2023, segala kegiatan dan pencapaian penulis lakukan bertujuan sebagai wahana pencapaian dan pengembangan diri.

MOTTO

”Selesaikan apa yang kamu mulai, perkara berhasil atau gagal itu urusan belakang yang terpenting kamu sudah berusaha”

(Marwati, Ibunda Tercinta)

“Sukses itu bukan hanya berhasil meraih yang kita rencanakan, sukses juga adalah berhasil bangkit ketika jatuh.”

(Anies Rasyid Baswedan)

“ Educationis radices amarae, fructus dulce ”

(Akar pendidikan terasa pahit, tetapi buahnya manis)

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmatNya yang tiada terhingga. Engkau telah meridhai langkah hambaMu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Ujang Suhadi dan Marwati

Serta ketiga Kakak perempuanku

Novi Anggana Dewi, Devi Ernanda Sagita, dan Riska

Agnes Suhadi

Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan dalam setiap langkahku, dan terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selalu dicurahkan tiada hentinya.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**KESIAPAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA PEMERINTAHAN DESA BERBASIS *WEBSITE* (Studi Perbandingan Desa Margototo dan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)**”.

Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis miliki. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan serta hambatan tanpa adanya doa, dukungan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, dengan demikian pada kesempatan ini diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., L.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung;
4. Bapak Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P., selaku pembimbing utama. Terima kasih atas kesediaan dan keikhlasannya dalam membantu dan memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas semua kebaikan Bapak;

5. Ibu Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P., selaku Pembimbing kedua. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan, kesabaran, dan arahan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi. Ilmu dan nasihat yang diberikan selama proses bimbingan sangat berharga bagi penulis agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas semua kebaikan Ibu;
6. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan masukkan yang positif agar skripsi ini dapat lebih baik lagi, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya semoga Bapak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas motivasi, saran, dan dukungan yang diberikan semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak ibu, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang diberikan selama masa studi.
9. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih telah membantu penulis dalam hal administrasi pada masa perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah SWT.
10. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ujang Suhadi dan Ibu Marwati. Malaikat tak bersayap yang Allah turunkan untuk menjaga, merawat, dan membesarkanku hingga saat ini. Tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan betapa berharganya kasih sayang dan dukungan yang diberikan selama perjalanan penyelesaian skripsi ini. Bapak dan Ibu, Terima kasih atas segala upaya, doa, dan motivasi yang telah diberikan, sepanjang langkahku dalam menyelesaikan skripsi ini di dorong oleh ketulusan cinta dan kepercayaan dari kalian.

Bapak, tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa besarnya rasa terima kasih Ria atas dukungan, nasihat, dan cinta yang diberikan sepanjang perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dedikasi, usaha, dan pengorbanan yang telah dilakukan agar putrimu ini dapat merasakan bangku perkuliahan.

Ibu, pintu surgaku. Terima kasih atas kebaikan, kesabaran, dan doa-doa yang selalu mengiringi setiap langkahkahku. Walaupun seringkali kita berbeda pendapat dan berselisih paham tetapi dari ibu, Ria belajar kekuatan dari kesabaran dan kelembutan. Ria sangat bersyukur memiliki seseorang yang hebat seperti Ibu yang selalu memberikan kepercayaan diri dan keyakinan untuk mencapai semua impian Ria.

Dengan kerendahan hati kepada Bapak dan Ibu, Ria memohon maaf atas perilaku, sikap, dan perkataan yang kurang berkenan. mohon maaf Ria masih selalu merepotkan dalam segala hal. Terima kasih telah sabar menghadapi Ria yang sering kali egois dan banyak mengeluh. Semoga Allah selalu melindungi Bapak dan Ibu dimanapun dan kapanpun. Amiin Yarabbalalamin.

11. Kakak-Kakakku tercinta, Teh Nopi, Teh Depi, dan Teh Riska. Terima kasih telah mendukung adikmu dari awal hingga tahap ini, dan semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah SWT dimanapun dan kapanpun.
12. Keponakan-keponakanku tersayang, Akak Bila, Abang Habibi, Sasha, dan dedek ainun. Terima kasih telah membawa keceriaan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat penulis sejak SMA "*Rumpi No Secret*". Anisa Dewi, Anastasya Rita Ananda, Feronika Wijaya, Desmita Ramadhani, Shindi Atalia, dan Vera Mailani. Terima Kasih atas motivasi dan dukungannya kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih atas canda, tawa, dan waktu yang diberikan, terima kasih masih selalu kebersamai penulis dalam

berbagai keadaan dan kondisi, semoga kita semua sukses dan dapat membawa kebahagiaan bagi Orang tua. Amiin Yarabbalalamin.

14. Sahabat semasa kecil. Serlyna, Terima kasih karena selalu ada untuk penulis dan terus memberi dukungan, motivasi, dan nasihat. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup penulis dengan mendengarkan, memahami, dan mendukung. Semoga kita terus bersama dalam segala hal dan semoga Allah SWT mempermudah dalam menggapai cita-cita yang diimpikan.
15. Teman-teman seperjuangan MBKM Penelitian Desa Margototo dan Desa Margosari, Novika Dwi L, Sri Mulyani I, Reka Aryana PS, Yulisa Al Rizka, Tegas Adli A, Diska Amanda H, Zacky Mauladin A, M. Rayhan Ramandha, dan Ramadhan. Terima kasih telah mewarnai dunia perkuliahan penulis terutama selama melaksanakan MBKM Penelitian. Semoga hubungan kita akan terus terjalin.
16. Teman teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020. Elsyifa, Neneng Arrum, Indah, Anastasya, Regita, Mifta, Faried, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis tulis satu-persatu terima kasih telah mengisi hari-hari penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan dengan canda dan tawa. Semoga kelak kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Amiin.
17. Narasumber penelitian, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan dukungan dan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan narasumber dalam skripsi ini.
18. Pemerintah Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih telah menerima saya dalam melaksanakan MBKM Penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas pengalaman berharga yang diberikan salam pelaksanaan MBKM Penelitian.
19. Pemerintah Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih telah menerima saya dalam melaksanakan MBKM

Penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas pengalaman berharga yang diberikan salam pelaksanaan MBKM Penelitian.

20. Kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarannya.
21. Terakhir, kepada saya sendiri Aderia Ernanda. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap proses yang terbilang tidak mudah. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembelajaran dan penelitian khususnya dibidang pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 April 2024

Penulis

Aderia Ernanda

NPM. 2016021016

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Konsep <i>Electronic Government (E-Government)</i>	13
2.1.1. <i>Electronic Government (E-Government)</i>	13
2.1.2. Kesiapan Penerapan <i>E-Government</i>	15
2.1.3. <i>E-Government</i> Tingkat Desa	23
2.2. Tinjauan Konsep Teknologi Informasi	24
2.2.1. Pengertian Teknologi Informasi	23
2.2.2. Komponen Teknologi Informasi.....	27
2.3. Tinjauan Konsep Pelayanan Publik	28
2.3.1. Pengertian Pelayanan Publik	28
2.3.2. Unsur-Unsur Pelayanan Publik	28
2.3.3. Jenis Pelayanan <i>E-Government</i>	30
2.4. Tinjauan Tentang Desa	31
2.4.1. Pengertian Desa	31
2.4.2. Pemerintahan Desa	32

2.5. Kerangka Pikir.....	35
III. METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Tipe Penelitian.....	38
3.2. Lokasi Penelitian.....	39
3.3. Fokus Penelitian.....	39
3.4. Jenis Data.....	40
3.5. Informan Penelitian.....	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7. Teknik Pengolahan Data.....	44
3.8. Teknik Analisis Data.....	45
3.9. Teknik Validasi Data.....	46
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Gambaran Umum.....	47
4.1.1. Sejarah Desa Margototo	47
4.1.2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Margototo ..	49
4.1.3. Tingkat Pendidikan dan Luas Desa Margototo.....	50
4.1.4. Sejarah desa Margosari.....	51
4.1.5. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Margosari...	54
4.1.6. Tingkat Pendidikan dan Luas Lahan di desa Margosari...	54
4.2. Hasil Kesiapan Penerapan E-Government pada Pemerintah Desa Berbasis Website di Desa Margototo dan Desa Margosari.....	56
4.2.1. Pemerintah Desa Margototo	56
1. Sistem Data.....	56
2. Landasan Hukum.....	61
3. Kelembagaan	64
4. Sumber Daya Manusia	66
5. Infrastruktur Teknologi.....	73
6. Kepemimpinan dan Pemikiran yang Strategis	77

4.2.2. Pemerintah Desa Margosari.....	79
1. Sistem Data.....	80
2. Landasan Hukum.....	83
3. Kelembagaan	86
4. Sumber Daya Manusia	88
5. Infrastruktur Teknologi.....	96
6. Kepemimpinan dan Pemikiran yang strategis	101
4.3. Pembahasan Hasil Kesiapan Penerapan E-Government pada Pemerintah Desa Berbasis Website di Desa Margototo dan Desa Margosari.....	103
4.3.1. Pemerintah Desa Margototo	103
1. Sistem Data.....	103
2. Landasan Hukum.....	111
3. Kelembagaan	115
4. Sumber Daya Manusia	117
5. Infrastruktur Teknologi.....	122
6. Kepemimpinan dan Pemikiran yang Strategis	124
4.3.2. Pemerintah Desa Margosari.....	125
1. Sistem Data.....	125
2. Landasan Hukum.....	128
3. Kelembagaan	131
4. Sumber Daya Manusia	132
5. Infrastruktur Teknologi.....	136
6. Kepemimpinan dan Pemikiran yang Strategis	137
4.4. Perbandingan Kesiapan Penerapan E-Government pada Pemerintah Desa Berbasis Website di Desa Margototo dan Desa Margosari	139
V. KESIMPULAN DAN SARAN	154
5.1. Kesimpulan	154
5.2. Saran	155

DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN	160

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. <i>Rank</i> Indonesia dalam <i>United Nation E-Government Survey</i>	3
2. Penelitian Terdahulu.....	6
3. Data Desa dan Website di Kecamatan Metro Kibang.....	9
4. Data Informan	41
5. Nama-Nama Kepala Desa Margototo	48
6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Margototo	49
7. Tingkat Pendidikan dan Luas tanah Desa Margototo	50
8. Potensi Pertanian Desa Margototo	50
9. Nama-Nama Kepala Desa Margosari.....	53
10. Mata Pencaharian Penduduk Desa Margosari.....	54
11. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Margosari	55
12. Luas Lahan Masyarakat Desa Margosari	55
13. Pengelola website Desa Margototo	68
14. Anggaran Pengembangan dan Maintenance website.....	76
15. Anggaran Pengembangan dan Maintenance website.....	76
16. Pengelola Website Desa Margosari.....	91
17. Anggaran Pengembangan dan Maintenance website.....	99
18. Anggaran Pengembangan dan Maintenance website.....	99
19. Anggaran Pengembangan dan Maintenance webiste.....	100
20. Anggaran Pengembangan dan Maintenance webiste.....	100
21. Perbandingan Kesiapan Penerapan E-Government Berbasis <i>Website</i> ..	140
22. Triangulasi data penelitian Desa Margototo	147
23. Triangulasi data penelitian Desa Margosari.....	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	37
2. Struktur Pemerintahan Desa Margototo	51
3. Struktur Pemerintahan Desa Margosari.....	53
4. Info Grafis Keuangan dan Penduduk Website Desa Margototo	57
5. Pengadaan infrastruktur Pemerintah Desa Margototo	75
6. Info Grafis Penduduk dan Keuangan Desa Margosari	82
7. Database Kependudukan	82
8. Fitur Pengaduan Website Desa Margosari.....	93
9. Pengadaan Infrastruktur Pemerintah Desa Margosari	98
10. Analogi Sistem Data.....	106
11. Info Grafis Jumlah Penduduk Desa Margototo	107

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memberikan informasi yang merata bagi rakyatnya. Dengan berkembangnya teknologi di berbagai sektor kehidupan khususnya pada sektor pemerintahan mulai memanfaatkan penggunaan teknologi terutama dalam penyebaran informasi dan pelayanan publik, munculnya inovasi ini sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat atas hak mereka untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik yang maksimal. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan disebut dengan istilah *E-Government*, hal ini merupakan suatu bentuk inovasi tata pemerintahan berbasis elektronik agar dalam penyelenggaraannya lebih optimal dan efisien.

Berdasarkan pengertian lain menurut World Bank dalam (Indrajit, 2006:2) merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti *Wide Area Network* (WAN), internet, dan *mobile computing* oleh institusi pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa *E-Government* adalah menggabungkan teknologi dengan kegiatan pemerintahan sehingga dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat. Tujuan dari *E-government* adalah untuk mengoptimalkan pelayanan publik, mewujudkan pemerintah yang transparan, dan dapat memberdayakan masyarakat melalui informasi yang diberikan. hal ini sesuai dengan instruksi pemerintah dalam penerapan *E-Government* dalam Inpres nomor 03 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan

E-Government dijelaskan bahwa pengembangan *E-Government* merupakan perwujudan pemerintah mengikuti seiring perkembangan teknologi sehingga pemerintah dapat memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, efisien dan transparan. Penerapan *E-Government* di Indonesia dikelola oleh direktorat *E-Government*, satuan kerja yang dibawah oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023.

Perkembangan *E-Government* di Indonesia berawal dari Inpres No 03 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, dapat di katakan bahwa inovasi terkait *E-Government* sudah sejak 20 tahun yang lalu dan dapat dilihat dalam penerapannya di Indonesia menurut data yang dirilis PBB melalui *United Nation E-Government Survey* pada tahun 2022 menempatkan posisi Indonesia di peringkat ke 77 dari 193 Negara di dunia, selain itu dapat dilihat juga dalam tabel 1 bahwa dalam kurun waktu 19 tahun Indonesia dapat dikatakan mengalami sedikit peningkatan yang dinilai berdasarkan *E-Government Development Indeks* (EGDI) yang merupakan indeks komposit untuk mengukur kapasitas pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aktivitas pelayanan publik. Peningkatan nampak pada 2022 yang mana Indonesia mengalami kenaikan 11 peringkat di bandingkan tahun 2020 yang menempati posisi di peringkat 88 dari 193 negara di dunia, tetapi pencapaian tersebut belum dapat dikatakan maksimal karena tetap saja dalam penerapannya Indonesia termasuk negara dengan pencapaian *E-Government* menengah kebawah.

Tabel 1. Rank Indonesia dalam United Nation *E-Government* Survey

No	Tahun	E-Government Development Indeks (EGDI)	Peringkat Dunia
1.	2003	0,4224	70
2.	2004	0,3909	86
3.	2005	0,3819	96
4.	2008	0,4107	106
5.	2010	0,4026	109
6.	2012	0,4949	97
7.	2014	0,4407	106
8.	2016	0,4478	116
9.	2018	0,5258	107
10	2020	0,6612	88
11.	2022	0,7160	77

Sumber: Survey United Nation E-Government, 2023

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa perkembangan *E-Government* di Indonesia dapat dikatakan masih kurang baik sebab dalam kurun waktu 20 tahun kondisi Indonesia dapat dikatakan stagnan karena jika dilihat pada peringkat di tahun 2003 yaitu pada awal penerapan Indonesia berada di peringkat 70 kemudian hasil terbaru di tahun 2022 Indonesia menempati posisi di peringkat 77 dari 193 negara. hal ini dapat menjadi cerminan bagaimana kesiapan penerapan untuk pemerintah pada tingkatan yang lebih rendah seperti Kabupaten atau Desa, karena dilihat secara umum berdasarkan pemeringkatan tersebut pelaksanaan *E-Government* di Indonesia dapat dikatakan kurang mumpuni. Memang diketahui bahwa inisiatif *E-Government* sangat membutuhkan kesiapan yang matang sebab dalam pelaksanaannya bukan sekedar mengikuti *trend* tapi membutuhkan adanya komitmen agar dapat terus berkelanjutan.

Membahas terkait *E-government*, sebenarnya tidak hanya dilaksanakan ditingkat pemerintah pusat, sejak munculnya Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa mengharuskan memiliki Sistem Informasi Desa (SID) sehingga penyelenggaraan pemerintah desa tentunya tidak dapat menghindar lagi dari kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Pemerintah desa diharapkan dapat menyelaraskan dengan perkembangan tersebut dalam menjalankan fungsi organisasinya, dengan demikian kesiapan dari organisasi perlu diperhatikan dalam pengembangan *E-Government* (Nugroho,2020).

E-Government pada pemerintahan desa berkaitan erat dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID) karna hal tersebut merupakan salah satu bagian dari pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga secara eksplisit di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pada pasal (86) tentang Sistem Informasi Desa (SID) adanya peraturan tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan di desa.

Hadirnya Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dalam paradigma *E-Government* memberikan dampak yang baik dan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi serta berkomunikasi dengan interaktif. *E-Government* juga memberikan manfaat bagi pemerintah desa, karna sebagai tempat pertanggungjawaban desa atas penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadikan pemerintahan desa lebih efisien dan transparan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa dan hal ini mengindikasikan bahwa penerapan *E-Government* pada pemerintahan desa sangat penting karena salah satu tujuan dibentuknya peraturan desa adalah untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta bertanggung jawab dan hal ini dapat di wujudkan dengan menerapkan *E-Government*.

Inovasi ini diharapkan adanya kemajuan interaksi antara masyarakat dan pemerintah agar lebih atraktif maksudnya yaitu interaksi yang terjadi tidak hanya satu arah karena dengan adanya *website* masyarakat dapat menyuarakan dan memberi kritik atau pendapat pada kolom kementar yang tersedia di *website* terkait jalannya pemerintahan desa dan hal tersebut dapat menjadi acuan serta masukan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Fungsi adanya *Website* desa sebenarnya selain sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menyebarluaskan terkait informasi publik bagi masyarakat agar dapat memperoleh informasi yang tidak terbatas, *website* juga menjadi alat untuk mempromosikan potensi desa dan pemanfaatan teknologi informasi juga sebagai pendukung cita-cita desa untuk menuju desa yang mandiri dan hal ini dapat diwujudkan dengan penerapan *E-Government* pada pemerintahan desa. Tetapi, dalam menerapkan *E-Government* tentu dibutuhkan kesiapan yang matang sebab dalam penerapannya berkaitan erat dengan keterwujudan nilai-nilai yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, keterbukaan, ketepatan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Gil-Garcia,2012) dalam (Irawan.,dkk, 2021). Sebagai upaya mendukung penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesiapan penerapan *E-Government* pada tingkat pemerintahan desa sebagai bahan referensi dan rujukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Berikut disajikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan di tingkat pemerintah desa terkait kesiapan penerapan *E-Government* di tingkat pemerintahan desa.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti/Tahun	Hasil Penelitian
1.	Sistem E-desa (Studi Kasus Desa Margototo)	Ngajiyanto dan Muntikasari 2014	Dalam penelitian ini berfokus pada pembangunan sistem E-Desa berbasis <i>Website</i> untuk Desa Margototo. Dan diharapkan adanya sistem E-Desa tersebut dapat membantu pemerintah Desa Margototo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2.	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Aplikasi Sispedal dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance	Elsa Prisanda 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini membahas penerapan berbasis Aplikasi yang menghasilkan bahwa aplikasi SISPEDAL dapat membantu pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. • Dan ditemukan juga terkait kurangnya sumber daya manusia (sdm) pemerintah desa sehingga penggunaan aplikasi kurang maksimal.
3.	Kesiapan Desa dalam Penerapan <i>E-Government</i> (Studi Perbandingan di Desa Semaya dan Desa Penggiringan kabupaten Pematang)	Subhan dan Budy Pratama 2019	<ul style="list-style-type: none"> • suksesnya <i>E-Government</i> di Desa penggiringan karena didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang IT hal ini sudah dibuktikan dengan diterimanya penghargaan dari WEBSITE.ID AWARD 2018. • <i>Website</i> desa penggiringan tidak hanya untuk sistem informasi desa tetapi sebagai portal pelayanan publik untuk urusan administrasi.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Tabel 2 (lanjutan)

No	Judul	Peneliti/Tahun	Hasil Penelitian
4.	Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Electronic Government di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran	Hiro Isman 2019	<p>Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • .kapasitas perangkat desa dalam memahami dasar-dasar <i>E-Government</i> masih kurang kecuali pada Desa hanura yang sudah memanfaatkan dengan baik teknologi informasi. • Masih kurangnya tingkat pemahaman perangkat desa terkait manajemen sumber daya manusia. • Kemampuan teknis aparatur desa dalam pengoprasian komputer cukup mampu karena dalam perekrutan perangkat desa wajib lulusan SMA/ sederajat. • Dalam pengelolaan <i>website</i> masih terbatas pada operator desa saja. • Sedangkan untuk Desa Hanura dalam pengelolaan <i>website</i> juga dilakukan oleh tim yang memang berkompeten di bidang IT.
5.	Peranan <i>E-Government</i> dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring	Dewa Gede Atmajaya dan Gede Wirata 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan <i>E-Government</i> di Desa Sanding sangat membantu pelayanan terhadap masyarakat. • Ditemukan juga banyaknya pelimpahan tugas yang diakibatkan banyak aparatur desa yang tidak mampu menyelesaikan beban kerjanya. • Sulitnya jaringan Internet di Desa sanding yang menjadi hambatan dalam peerapan <i>E-Government</i> di Desa.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Tabel 2 (lanjutan)

No	Judul	Peneliti/Tahun	Hasil Penelitian
6.	Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk <i>E-Government</i> di Desa Girikerto.	Wuri Rahmawati dan Zahra Arwaningtyas 2020	Ditemukan bahwa penerapan <i>E-Government</i> di Desa Girikerto belum terlihat, karena <i>website</i> desa yang dimiliki belum dilakukan pembaharuan secara berkelanjutan dan juga domain <i>website</i> bukan dari penyedia domain desa (ID) tetapi menggunakan domain Blogspot yang dapat dikatakan belum relevan jika digunakan untuk domain <i>website</i> desa.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Tetapi realitanya dalam menerapkan *E-Government* khususnya di tingkat Pemerintahan Desa kurang adanya *progress* karena penerapannya seringkali terhenti pada tahap 1 atau pada tahap 2 yang mana di kedua tahap itu *website* desa hanya sekedar menyediakan informasi sehingga hanya adanya komunikasi satu arah dari pemerintah dan belum adanya pelayanan yang di berikan hal ini dapat dikatakan belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat dan juga berdasarkan hasil penelitian (apriyanto,dkk 2022) menunjukkan bahwa belum banyaknya pemerintah desa yang berhasil dalam mengembangkan *E-Government* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur teknologi dan paling banyak ditemukan adalah kekurangannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten khususnya di bidang IT (Informasi Teknologi) berdasarkan hal tersebut pentingnya melihat kesiapan desa dalam menerapkan *E-Government* (*E-Government Readiness*). Dalam tahap melihat kesiapan dari *E-Government* dapat dilihat dari sisi *provider* (pemerintah) dan sisi *user* (masyarakat) dan dalam penelitian ini akan berfokus pada kedua sisi tersebut.

Beralih di Kabupaten Lampung Timur Khususnya di Kecamatan Metro Kibang ditemukan bahwa seluruh desa diketahui telah memiliki *website* desa masing-masing namun yang menjadi sorotan adalah pemanfaatannya tidak dilakukan dengan maksimal karena jika ditelusuri lebih dalam lagi *website-website* tersebut tidak adanya konten yang diperbaharui, berikut daftar desa dan link *website* yang ada di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 3. Data Desa dan Website di Kecamatan Metro Kibang

No	Nama Desa	Link Website
1.	Desa Jaya Asri	jayaasri-lampungtimur.desa.id
2.	Desa Kibang	https://kibang-desa.id
3.	Desa Marga Jaya	Margajaya-lampungtimur.desa.id
4.	Desa Margosari	https://margosari-desa.id
5.	Desa Margototo	https://margototo-desa.id
6.	Desa Purbosembodo	Purbosembodo-lampungtimur.desa.id
7.	Desa Sumber Agung	https://sumberagung-desa.id

Sumber: Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Lampung timur, 2023

Berdasarkan tabel 3 memang dari ke tujuh desa yang ada seluruhnya telah memiliki *website* desa masing-masing, namun yang menjadi perhatian adalah adanya fasilitas tersebut ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa desa, jika ditelusuri link *website* yang terdaftar hanya Desa Margototo dan Desa Margosari yang memanfaatkan adanya *website* desa tersebut dan 5 desa lainnya jika ditelusuri satu persatu *website* tersebut tidak digunakan sama sekali bahkan tidak ada konten yang di isi pada lama *website* tersebut. berdasarkan hal tersebut maka nampak bahwa Desa Margototo dan Desa Margosari yang mulai fokus mengembangkan *E-Government* ditingkat pemerintah desa.

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti bahwa Desa Margototo berencana mempersiapkan pelayanan secara *digital* yaitu rencananya segala kegiatan pelayanan dapat dilakukan dengan memindai kode QR (*Quick Response*) atau hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga segala kegiatan surat menyurat dapat dengan mudah dilayani secara virtual melalui *website* desa yang dimiliki, namun hal tersebut belum dapat terealisasi hingga saat ini karena terkendala penginputan data yang belum terkumpul dari setiap dusun di Desa Margototo hal ini diduga karena lambatnya aparat desa dalam proses pengumpulan data masyarakat dan hal ini juga diduga berdampak pada *website* Desa Margototo yang nampak kurang informatif dikatakan demikian karena data yang disajikan tidak begitu lengkap contohnya saja seperti tidak adanya data keuangan desa, data jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan data desa, dan tidak adanya *update* kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Desa Margosari demikian, pihak pemerintah desa sedang mempersiapkan pelayanan secara *digital* yang mana hal ini telah dibuktikan dengan mereka membentuk tim khusus untuk pelaksanaannya, tim tersebut beranggotakan 3 orang yang diambil dari Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (*posyantekdes*), namun memang masih adanya beberapa kendala salah satunya yaitu terkait anggaran sehingga pelayanan secara *online* di Desa Margosari belum terealisasi. Tetapi jika dilihat pada *website* Desa Margosari relatif lebih berkembang hal ini dibuktikan pada informasi yang disajikan di *website* lebih lengkap seperti adanya data penggunaan dana desa, jumlah dana desa, jumlah penduduk, sejarah desa, berita terkini terkait desa, dan *update* kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan karena Desa Margototo dan Desa Margosari yang nampak aktif dalam menggunakan *website* dan berencana untuk mentransformasikan pelayanan secara digital

maka hal ini menarik peneliti untuk melihat bagaimana kesiapan penerapan *E-government* tingkat pemerintahan desa dengan membandingkan di dua desa yaitu di Desa Margototo dan Desa Margosari, selain itu Desa Margosari merupakan desa pemekaran dari Desa Margototo sehingga hal ini menarik peneliti untuk melihat bagaimana kesiapan penerapan *E-government* antara desa induk dengan desa pemekaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan penerapan E-Government pada pemerintahan desa, perbedaan lainnya terletak pada metode yang digunakan, dalam penelitian ini untuk membandingkan menggunakan penelitian kualitatif dan dengan pendekatan komparatif metode *Most Similar System (MSS)* yaitu metode yang membandingkan tempat atau negara yang sama dan memiliki fitur yang sama, hal ini mengingat bahwa Desa Margototo dan Desa Margosari yang sama-sama belum melakukan pelayanan secara digital melalui *website* desa masing-masing.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah “ Bagaimana Kesiapan Penerapan E-Government pada Pemerintahan Desa Berbasis *Website* di Desa Margototo dan Desa Margosari?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kesiapan Penerapan E-Government pada Pemerintahan Desa Berbasis *Website* di Desa Margototo dan Desa Margosari.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan memiliki manfaat, antara lain:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat sebagai referensi, khususnya terkait kajian *E-Government* pada pemerintahan desa untuk membawa kemajuan desa.
- b. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat luas terkait penerapan *E-Government* di desa serta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan pemerintah desa dalam memaksimalkan penerapan *E-Government* pada wilayahnya masing-masing.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Konsep *Electronic Government (E-Government)*

2.1.1. *Electronic Government (E-Government)*

Electronic Government (E-Government) merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Penerapan *E-Government* merupakan kemampuan yang diterapkan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung hubungan antara pemerintah-masyarakat, pemerintah-pelaku bisnis, dan pemerintah-pemerintah.

Menurut John P Gun (2008) dalam (Ilham,2021), mendefinisikan beberapa pengertian, *E-government* sebagai salah satu bentuk dari pemerintah *digital* yang mengacu pada ketersediaan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang paling utama adalah penggunaan internet dalam pemerintahan. Pengertian lain, *E-Government* sebagai aktivitas organisasi politik dengan memanfaatkan teknologi baik di dalam maupun diluar negeri, *E-Government* merupakan sarana untuk mencapai tujuan politik dan pemerintah yang berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pengertian lain, dipahami bahwa *E-Government* atau *Electronic Government* merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintah dalam memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat.

E-Government merupakan suatu mekanisme baru sebagai bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lainnya yang

melibatkan teknologi informasi terutama internet dengan bertujuan untuk menaikkan kualitas pelayanan. Adanya *E-Government* dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas tata kelola pemerintah pada berbagai level, hal ini juga diperkuat dengan adanya Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menyatakan bahwa :

- a. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka diperlukan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.
- b. Bahwa dalam meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukannya tata kelola pemerintahan dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan peraturan presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selain itu *E-Government* memiliki berbagai manfaat dalam tata kelola pemerintahan, menurut Rahardjo (2005:4) manfaatnya antara lain;

- 1) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, ketersediaan informasi tanpa batas karna disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu tanpa harus datang ke kantor, serta informasi dapat diperoleh di manapun seperti di kantor dan di rumah tidak perlu lagi masyarakat harus datang secara fisik ke kantor pemerintahan.
- 2) Adanya peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan memunculkan adanya sikap transparansi sehingga dapat menghilangkan rasa kecurigaan dan kekesalahan dari pihak lain.

- 3) Dengan adanya keterbukaan informasi dapat dengan mudah melakukan pemberdayaan masyarakat karena informasi yang sangat mudah untuk diperoleh, dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah menentukan pilihannya masing-masing.
- 4) Pertemuan pemerintah akan lebih efisien, misalnya saja akan diadakannya koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hal ini dapat dilakukan dengan email atau dengan video *conferencing* hal ini sangat membantu, terlebih lagi Indonesia memiliki wilayah yang besar sehingga koordinasi dapat dilakukan tanpa perlu datang secara fisik ke lokasi.

Pada intinya dipahami bahwa *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat dan para stakeholdernya, menurut Instruksi Presiden No 03 Tahun 2003 terkait kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government*, pemanfaatan teknologi dan informasi meliputi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kinerja antara elektronik serta pemerintahan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat di sebuah wilayah negara.

2.1.2. Kesiapan Penerapan Konsep *E-Government*

Dalam upaya penerapan konsep *E-Government* memiliki beberapa faktor penentu yang menjadi landasan dan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah dalam menetapkan *E-Government*, beberapa faktor dibawah ini patut menjadi pertimbangan (Indrajit. 2006:7) yaitu:

1. Infrastruktur Telekomunikasi, pada tahaan pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan *E-Government*. Secara ideal memang sudah seharusnya ketersediaan infrastruktur yang mumpuni sehingga dapat menunjang target pengembangan *E-Government* yang telah di sepakati, namun perlu diperhatikan juga potensi dan kemampuan atau status pengembangan infrastruktur telekomunikasi pada lokasi terkait.
2. Tingkat koneksi dan penggunaan Informasi Teknologi oleh pemerintah, melihat bagaimana perkembangan pemerintah dalam memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan terlihat sejauh mana kesiapan dari daerah tersebut dalam menerapkan *E-Government*.
3. Kesiapan Sumber daya Manusia (SDM) di pemerintah yang akan menjadi aktor utama dalam inisiatif *E-Government*. Pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan sehingga level kompetensi dan keahlian akan menjadi faktor penentu dalam performa penerapan *E-Government*. Semakin tinggi tingkat kompetensi SDM di pemerintah maka semakin siap untuk menerapkan konsep *E-Government*.
4. Perangkat Hukum, dalam penerapan *E-Government* terkait penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual maka hal ini perlu di lindungi Undang-Undang atau peraturan yang berlaku dan pemerintah harus memiliki hukum yang menjamin terciptanya mekanisme *E-Government* yang kondusif.
5. Ketersediaan dana dan anggaran, dalam penerapan *E-Government* tentu membutuhkan sumbr daya finansial untuk membiayainya. Perlu diperhatikan bahwa dalam penganggaran penerapan *E-*

Government tidak sekedar investasi belaka namun perlunya penganggaran biaya oprasional, pemeliharaan, dan pengembangan di kemudian hari.

6. Perubahan paradigma, perubahan paradigma ini akan bermuara pada kebutuhan akan kesadaran dari keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, berperilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika pemimpin dan karyawan tidak ingin berubah maka dapat dipastikan bahwa penerapan konsep *E-Government* belum siap.

Hal itu juga selaras dengan teori Richard Heeks dalam (Indrajit, 2006) terkait kesiapan penerapan *E-Government* (*E-Government Readiness*) yang dilihat berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut

1. Sistem Data

Definisi sistem data dalam konteks *E-Government* berhubungan dengan proses kerja yang terbagi dalam basis data yang berkaitan dengan pengumpulan dokumen dan penggunaan dokumen, Manajemen data berkaitan dengan pengelolaan dokumen berbasis digital dengan bantuan teknologi informasi sehingga dapat menyediakan data yang berkualitas. Pada pemerintahan desa sistem data berkaitan dengan aspek pengelolaan data penduduk, pelayanan publik, keuangan, hingga evaluasi kegiatan desa yang dapat terimplementasi dalam website, secara ringkas hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Basis data

- a. Pengumpulan dokumen , merupakan pengumpulan dokumen yang akurat dan efiisen dari berbagai sumber, termasuk database pemerintah, survei, data dari organisasi lain, hal ini penting untuk Memahami kebutuhan masyarakat, identifikasi masalah, dan mengukur kinerja layanan publik. dalam pengumpulan dokumen diperlukannya pencatatan dan

pengarsipan dengan demikian karena dalam hal ini berkaitan E-Government maka berhubungan dengan pencatatan dan pengarsipan dokumen secara digital yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa terutama dokumen-dokumen yang mendukung untuk pelayanan publik secara digital.

- b. Penggunaan data, dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan data untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, data yang telah dikelola dan diakses melalui portal yang sudah disiapkan harus memungkinkan transparansi, akuntabilitas dan memungkinkan masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah Desa.
- c. Keamanan data, dalam hal ini berkaitan dengan data yang disimpan harus digunakan dengan tepat dengan tujuan yang sah terutama terkait data kependudukan karna hal tersebut menyangkut privasi masyarakat. Keamanan juga diperhatikan dari portal yang digunakan dalam hal ini memperhatikan tingkat kemanan dan perlindungan dari *website* dengan memperhatikan kebaruan sistem keamanan dan versi *website*. Biasanya *website* yang aman memiliki sertifikat SSL (*Secure Socket Layer*).

Manajemen Data

dalam hal ini berkaitan dengan pengolahan data/dokumen desa yang melibatkan teknologi dalam memanage data dengan bantuan teknologi hal ini bertujuan agar data yang sudah diolah dapat menjadi informasi yang dapat mendukung pemerintah desa dalam mengambil keputusan. Selain itu sudah saling terintegrasinya sistem untuk memungkinkan pemerintah desa dapat menyediakan layanan publik yang lebih baik dan efisien.

2. Landasan Hukum

Dalam indikator ini terkait landasan hukum yang melandasi pelaksanaan *E-Government* ditingkat pemerintahan desa, dengan kata lain dalam pelaksanaannya memiliki aturan yang tegas dan menjamin terciptanya mekanisme *E-Government* yang kondusif. Memiliki peraturan yang jelas agar adanya keberlanjutan dari pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya ditingkat pemerintahan desa dan dinilai juga pemahaman aparatur desa terkait peraturan tersebut. pentingnya ketersediaan landasan hukum sebab dalam memastikan beroperasinya E-Government pada kerangka hukum yang mendukung serta mengatur jelas pelaksanaannya.

- Adanya aturan/kebijakan yang jelas mengenai standar pelaksanaan E-governrment pada tingkat pemerintah Desa.
- Pemahaman aparatur desa terkait peraturan/kebijakan yang mengatur penerapan E-Governrment ditingkat pemerintah desa.

3. Kelembagaan

Perkembangan penerapan pemerintahan berbasis informasi teknologi dapat berpengaruh jika memiliki lembaga yang berfokus untuk menangani *E-Government* ditingkat pemerintah desa. Dengan kata lain berarti dalam hal ini berkaitan dengan badan/lembaga yang dibentuk untuk bertanggung jawab di tingkat desa dalam menerapkan inisiatif *E-Government*.

- Ketersediaan struktur organisasi yang jelas dan efektif dalam mengkoordinir pelaksanaan E-Governrment .
- Memiliki peran dan tanggung jawab yang sesuai dan jelas dalam mendukung pelaksanaan *E-Government*.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini memperhatikan ketersediaan SDM dengan menyesuaikan kualifikasi yang dibutuhkan dan tentunya memiliki kemampuan, pengetahuan, bahkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dengan memperhatikan latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi (TI) atau pernah mengikuti pelatihan/khursus terkait teknologi informasi. dalam hal ini dapat diukur dengan:

- a. Kemampuan Kompetensi, merujuk pada kecerdasan alami dan kreativitas. Hal ini merupakan sifat dasar manusia untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam konteks SDM kemampuan kompetensi ini diukur dengan pemahaman konsep *E-Government*, tujuan, dan manfaat yang diperoleh dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan dapat meningkatkan pelayanan publik.
- b. Kemampuan keterampilan, merupakan kemampuan yang dipelajari dan dikembangkan melalui pelatihan atau pengalaman pada suatu tugas atau profesi, dalam keterampilan ini dapat diukur dengan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi yang relevan dengan *E-Government*, kemampuan pengoperasian perangkat lunak, mengelola data, menggunakan platform digital dalam berinteraksi dengan masyarakat.

dalam hal ini perlu di perhatikan karena kemampuan dan kompetensi aparatur desa akan mempengaruhi berhasil tidaknya E-Government dilaksanakan agar sesuai dengan asas pemanfaatan yang diharapkan. Selain itu dilihat pula pada sisi masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM) secara kompetensi/kemampuan umum dari masyarakat sendiri dalam menggunakan teknologi

informasi, dilihat pula pada sosial dan budaya yang berarti masyarakat sudah mengadopsi budaya digital dalam artian bahwa pola pikir dari masyarakat sendiri sudah siap pada perubahan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-sehari.

Karena dalam penerapan *E-Government* tujuan utama adalah untuk memudahkan masyarakat jika penerapannya tidak berguna maka untuk apa dipersiapkan, sehingga diharapkan pemerintah desa dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat karena jika salah mengartikan maka akan menjadi bumerang bagi pemerintah desa dan akan semakin mempersulit pengembangan *E-Government* sebab yang menilai besar tidaknya manfaat yang diperoleh dari penerapan *E-Government* adalah masyarakat yang ada di kedua desa yaitu Desa Margototo dan Desa Margosari.

5. Infrastruktur Teknologi

Indikator ini merupakan salah satu fasilitas komponen 50% kunci dari keberhasilan, karena penerapan *E-Government* tidak terlepas dari adanya infrastruktur teknologi yang mendukung seperti sudah meratanya jaringan internet pada suatu daerah hal ini perlu diperhatikan karena di Indonesia sendiri masih banyaknya daerah-daerah yang belum merata jaringan internet atau (*Blank Spot*), ketersediaan perangkat keras yang mumpuni dan memiliki spesifikasi yang sesuai meliputi (komputer, jaringan, dan storage/penyimpanan), perangkat lunak yang meliputi (sistem operasi, perangkat yang menyediakan layanan, dan database sebagai sistem berjalannya *website*).

-ketersediaan internet: yang mencakup tingkat aksesibilitas internet pada suatu wilayah, karena ketersediaan internet

merupakan hal yang krusial untuk memungkinkan penerapan *E-Government* terutama penggunaan pelayanan online yang efektif dan efisien

- ketersediaan infrastruktur TIK, yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, yang memungkinkan untuk pengolahan dan akses data.

6. Kepemimpinan dan Pemikiran yang Strategis

Adanya peran pemimpin yang memiliki visi dan langkah strategis untuk mewujudkan penerapan *E-Government* merupakan indikator penilaian yang penting, karena pemimpin merupakan kunci dalam keberhasilan tanpa adanya peran pemimpin yang memiliki visi yang baik dan langkah strategis maka akan sulit mewujudkan penerapan *E-Government* yang optimal, dan pemimpin harus menjadi motivator ulung dalam kesiapan penerapan *E-Government*. Karena dalam penelitian ini berkaitan dengan pemerintah desa tentu saja kepemimpinan yang dimaksud adalah bagaimana seorang Kepala Desa sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa mengarahkan, memotivasi, mendukung, dan mempengaruhi bawahannya agar penerapan *E-Government* dapat berkelanjutan dan memberikan dampak baik juga bagi masyarakat. Dalam hal ini dapat diukur dengan melihat bagaimana:

- Adanya visi dan tujuan yang dibuat kepala desa untuk mewujudkan *E-Government*.
- Sikap kepemimpinan yang kuat dan dapat memotivasi serta mengarahkan pada tujuan penerapan *E-Government*.
- Adanya komunikasi yang baik antara kepala desa dengan aparatur desa dan masyarakat yang terlibat dalam mempersiapkan *E-Government*.

2.1.3. *E-Government* Tingkat Desa

Adanya *E-Government* agar memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat lebih nyaman, ramah, transparan, dan efektif. Sehingga hal tersebut menjadi dasar penerapan *E-Government* pada tingkat desa diharapkan aparatur desa dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemerintah desa membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkompeten dalam upaya mendukung penyelenggaraan desa yang mandiri dan partisipatif, memerlukan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kelembagaan pemerintah desa, dan memerlukan dukungan pemerintah kabupaten untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu dengan melakukan inovasi penyelenggaraan pemerintah melalui teknologi informasi.

Penerapan *E-Government* pada tingkat desa berkaitan erat dengan Sistem Informasi Desa (SID). Sistem Informasi Desa merupakan pengelolaan data desa baik secara administrasi, kependudukan, hingga terkait potensi desa yang kemudian seluruh data tersebut diolah menjadi informasi publik atau digunakan untuk keperluan lain terkait pemerintahan desa. Mengenai Sistem Informasi Desa tentu tidak dapat terpisahkan dari Undang-Undang Desa pada pasal 86 bagian ketiga tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan pedesaan disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwasannya Sistem Informasi Desa (SID) memiliki peran yang strategis dalam membantu pembangunan di Desa dan Kawasan Perdesaan dan Sistem Informasi Desa (SID) sangat

berperan dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan di Desa.

Sebenarnya Sistem Informasi Desa (SID) bukan hal baru dalam mendukung perencanaan dan pembangunan di desa sebelum di atur dalam Undang-Undang Desa, karena sebelumnya banyak desa yang telah mengembangkan Sistem Informasi Desa berdasarkan inisiatif atau fasilitas Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun dengan diaturnya Sistem Informasi Desa (SID) dalam Undang-Undang Desa menjadikan perannya semakin penting dalam pembangunan kawasan pedesaan terutama mengenai manajemen informasi data.

Menurut Mulyadi dalam (Isman, 2019) secara umum *E-Government* pada tingkat desa biasanya berupa situs atau *website*, keberlanjutan dari *website* ini menjadi hal penting dalam pengelolaan *E-Government*. Keaktifan, jumlah artikel dan fasilitas di *website* haruslah bervariasi dan menampilkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara umum Desa Margototo dan Desa Margosari telah memiliki *website* Desa yang saat ini masih dalam tahap perkembangan untuk pelayanan publik secara *digital*.

2.2. Tinjauan Konsep Teknologi Informasi

2.2.1. Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah penggunaan teknologi untuk mengelola data yang kemudian data tersebut diubah menjadi informasi. Dalam penggunaannya saat ini teknologi informasi banyak di perankan oleh komputer, namun karna danya perkembangan penggunaannya pun dapat di gantikan dengan perangkat lain yang memiliki sistem kerja yang sama yang dapat menggantikan sistem kerja komputer misalnya

seperti handphone dan tablet. Seiring berkembangnya penggunaan teknologi informasi banyak mempengaruhi segala bidang kehidupan masyarakat salah satunya dalam bidang pemerintahan yang mana penggunaan intranet dan internet dapat mempermudah menghubungkan terkait keperluan kependudukan, bisnis, dan kegiatan lainnya sebagai bagian tuntutan dari masyarakat. Adanya penerapan *E-Government* di lembaga pemerintahan dapat mempengaruhi peningkatan transparansi kegiatan dalam upaya membangun pemerintah yang bersih, transparan, dan berwibawa. Terkait keterbukaan informasi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah mengupayakan keberhasilan program *E-Government*.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam program *E-Government* tingkat desa adalah dengan adanya *website* desa. *Website* merupakan halaman web yang didalamnya terdapat domain yang berisikan informasi. *Website* dibuat biasanya terdiri dari berbagai halaman web yang berkaitan satu sama lain, *website* adalah halaman informasi yang disediakan melalui internet. *Website* merupakan himpunan dari komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi agar menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi (Rahmadi,2013:1). Halaman dalam web biasanya di akses dengan sebuah URL yang akan menjadi akar (*root*), yang disebut sebagai *homepage* (halaman induk atau beranda) yang disimpan dalam server yang sama, namun tidak seluruh *website* dapat diakses dengan gratis, namun terdapat beberapa *website* berbayar jika ingin mengakses. Semakin berkembangnya internet di dunia, hal tersebut tentu saja mempengaruhi kuantitas situs web yang meningkat dengan tajam, hingga saat ini jumlah halaman *website* yang dapat diakses berjumlah

miliaran. Dalam penggunaannya cukup mudah hanya dengan memanfaatkan handphone lalu browsing dengan mengakses *search engine* (mesin pencarian) seperti google kemudian masukkan kata kunci untuk menemukan *website* yang ingin diakses.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *website* merupakan penyedia informasi yang dapat diakses dengan internet dan memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya, berdasarkan tingkatan *E-Government* menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 pengembangan *website* sangat penting dalam *E-Government*, karena dalam proses penerapan diperlukannya beberapa kesiapan yang dijabarkan pada berikut;

1. Pada tahap 1 adalah persiapan, mencakup pembuatan situs informasi pada lembaga dengan kata lain berarti pembuatan situs web sebagai tempat pelaksanaan *E-Government*, menyiapkan sumber daya manusia yang mencakup pendidikan dan pelatihan untuk menuju penerapan *E-Government*, mempersiapkan sarana agar mudah untuk mengakses seperti pemerataan jaringan internet. Pada tahap pematangan berarti hanya adanya komunikasi pasif satu arah pemerintah dengan masyarakat menggunakan teknologi yaitu *website* dan jika masyarakat ingin memperoleh informasi mengenai pemerintah dapat melakukannya sendiri dengan mengakses *website* tersebut.
2. Tahap 2 yakni pematangan, hal ini mencakup pembuatan situs informasi yang interaktif dan situs lembaga yang saling berhubungan. Dipahami bahwa pada tahap pematangan ini berarti mulai adanya komunikasi 2 arah antara pemerintah dan masyarakat sehingga lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi semacam intranet dan fasilitas multimedia seperti melalui email, *tele conference*, chatting, dan sebagainya.

3. Tahap 3 pemantapan, mencakup pembentukan situs pelayanan publik, aplikasi, data dengan lembaga lain sehingga dapat berinteraksi dengan aplikasi lain (interopabilitas). Pada tahap pemantapan ini berarti dalam penerapan *E-Government* sudah pada tahap adanya transaksi yang merupakan proses pertukaran barang/jasa melalui *website* atau aplikasi yang melibatkan manusia, informasi, dan lain sebagainya.
4. Tahap 4, merupakan pemanfaatan yang mana pada tahap ini mencakup pada pembentukan aplikasi yang digunakan untuk proses pelayanan publik antara pemerintah dengan pemerintah G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Business*), dan G2C (*Government to Community*) yang sudah terintegrasi sehingga mempermudah untuk melakukan pengembangan layanan dikemudian hari agar lebih efektif dan efisien.

2.2.2. Komponen Teknologi Informasi

Perkembangan Teknologi Informasi tidak akan dapat berkembang dengan pesat tanpa adanya komponen yang kuat, menurut Seesar yang dikutip oleh Syarif Hidayatullah (2021:4) teknologi informasi memiliki 3 komponen utama yaitu perangkat keras (*Hardware*), Perangkat Lunak (*Software*), dan manusia (*Brainware*).

a. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras merupakan suatu perangkat yang menjadi fondasi pengembangan teknologi informasi. yaitu monitor, papan tombol, dan tetikus. Dalam komponen ini terbagi menjadi dua yaitu *Output* dan *input* yang merupakan peralatan dalam menerjemahkan data yang dapat dipahami manusia menjadi data yang dapat dipahami oleh mesin komputer. Sedangkan *Input*

merupakan perangkat yang dapat menampilkan hasil dari proses yang telah diolah oleh CPU, perangkat ini terdiri dari monitor dan printer.

b. Perangkat Lunak (*Software*)

Merupakan program yang dibuat dengan tujuan tertentu yang disusun agar komputer dapat melakukan apapun sesuai dengan keinginan pengguna.

c. Manusia (*Brainware*)

Dalam hal ini manusia merupakan orang yang terlibat langsung dalam penggunaan komputer seperti Analisis Sistem dalam hal ini berperan sebagai analisis terhadap masalah yang dihadapi dan merancang solusi dalam menghadapi masalah yang ada, sebagai Programmer yang berperan sebagai penerjemah rancangan yang dibuat oleh analisis ke dalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat diproses oleh komputer, sebagai operator yang berfungsi menjalankan komputer sesuai dengan instruksi yang diberikan, sebagai Teknisi yang berperan dalam merakit atau memelihara perangkat komputer, dan lainnya.

2.3. Tinjauan Konsep Pelayanan Publik

2.3.1. Pengertian Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, diartikan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam pemenuhan segala bentuk kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pelayanan publik ini merupakan salah satu bentuk fungsi

fundamental yang harus diemban oleh unsur institusi pemerintah baik dipusat maupun unsur pada pemerintah di daerah.

Hakekatnya pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2003 menyatakan bahwa; hakikat dari suatu pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat yang merupakan unsur perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat yang memiliki fungsi dasar pelayanan. Sedangkan pelayanan yang prima adalah pemberian pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku oleh instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik, dengan kata lain pelayanan prima berarti pelayanan yang *Excelent* yang merupakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pada pihak yang dilayani dengan memenuhi segala bentuk kebutuhan masyarakat sebagai unsur yang dilayani.

2.3.2. Unsur unsur Pelayanan Publik

Menurut (Kasmir, 2006) Unsur yang mencirikan pelayanan publik yang baik adalah sebagai berikut:

- a) Tersedianya karyawan yang baik.
- b) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
- c) Bertanggung jawab kepada setiap masyarakat dari awal hingga akhir pelayanan.
- d) Mampu melayani secara cepat dan tepat.
- e) Mampu berkomunikasi.
- f) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
- g) Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik.
- h) Berusaha memahami kebutuhan masyarakat.
- i) Mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

2.3.3. Jenis Pelayanan *E-Government*

Beragam tipe pelayanan yang dapat ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui *E-Government*, kategori jenis-jenis pelayanan tersebut dapat dilihat dengan dua aspek utama yaitu dari aspek kompleksitas yang menyangkut terkait seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi yang ingin dibangun dan diterapkan, kedua adalah aspek manfaat hal ini terkait dampak atau manfaat yang diperoleh oleh para penggunanya, berdasarkan hal tersebut Indrajit membagi proyek *E-Government* menjadi 3 kelas yaitu sebagai berikut :

1. *Publish*

Pada kelas ini hanya terjadi komunikasi satu arah, pemerintah hanya mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimiliki untuk dapat secara langsung dan dapat diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.

2. *Interact*

Berbeda dengan kelas sebelumnya yang nampak lebih pasif, pada kelas *Interact* sudah adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan yang berkepentingan. Dalam penggunaannya terdaat dua aplikasi yang dipergunakan. Yang pertama adalah adanya portal dimana situs terkait memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari informasi atau data secara spesifik, yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal-kanal yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui emai, FAQ (*Frequent Ask Question*), Newsletter, mailing list, dan lain sebagainya).

3. *Transact*

Dalam kelas ini hampir sama dengan sebelumnya yaitu adanya komunikasi dua arah dan juga sudah terjadinya interaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis masyarakat harus membayar jasa pelayan yang diberikan pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini sungguh lebih rumit dibandingkan dua sebelumnya karena dalam hal ini harus adanya keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dengan aman dan hak-hak *privacy* berbagai pihak yang bertransaksi dapat terlindungi dengan baik.

2.4. Tinjauan Tentang Desa

2.4.1. Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Widjaja dalam Nasrullah (2015) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan dalam menjalankan pemerintahan desa yakni dengan keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi. Dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Desa adalah *Self Community* yang merupakan komunitas yang mengatur dirinya

sendiri, hal ini karena desa memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

2.4.2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan wilayah terkecil dalam pemerintahan di bawah Kabupaten/kota, yang telah diberi hak otonomi sehingga mereka memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri hal ini telah di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014. Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disingkat dengan (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sejajar dan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dalam menjalankan pemerintahan desa diperlukan aktor yang menjadi motor dalam melaksanakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan desa atau disebut juga sebagai Kepala Desa yang berperan sebagai pemimpin atau kepala pemerintahan desa yang menjabat selama 6 tahun terhitung sejak masa pelantikan dan kemudian dalam melaksanakan tugasnya akan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa tersebut memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. Pemerintah desa memiliki peran strategis untuk

mengatur masyarakat yang ada di perdesaan untuk mewujudkan pembangunan pemerintah dan karena hal ini juga bahwa pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat. Berikut struktur organisasi pemerintah desa :

1. Kepala Desa

Merupakan pemimpin dalam tingkat pemerintahan desa yang bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dibantu oleh perangkat desa , menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 ayat 2 kepala desa memiliki kewajiban;

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya berasal dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55 BPD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

3. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan dan mempersiapkan administrasi desa dan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

4. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis atau disebut juga sebagai staff/kepala urusan yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Seksi (KASI) yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas teknis operasional yang biasanya terjun langsung dilapangan dan Kepala Urusan (KAUR) yang membantu Kepala Desa terkait hal administrasi dan kesekretariatan desa. Biasanya KAUR dan KASI terdiri dari :

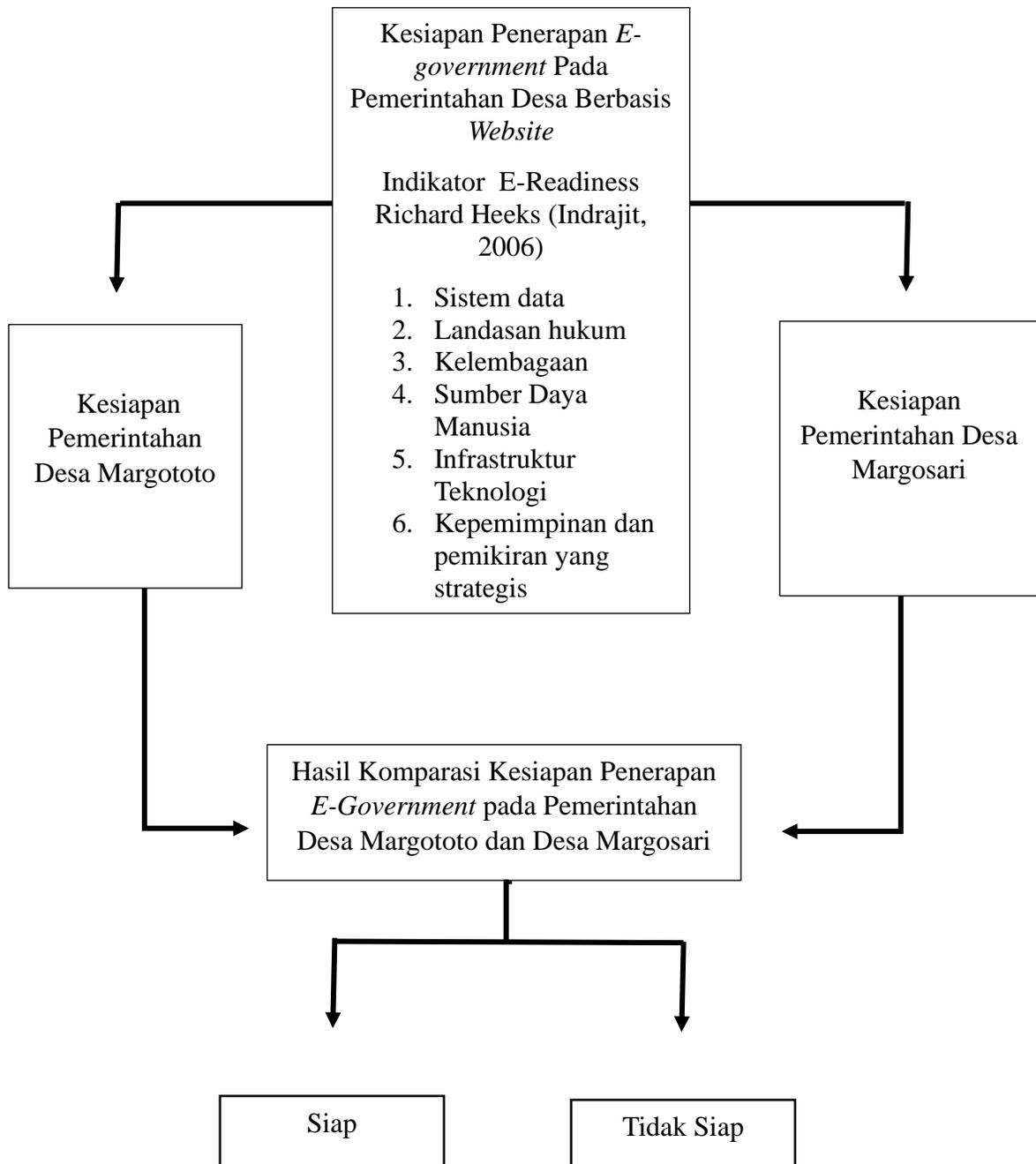
- a. Kepala Seksi Pemerintahan (KASI PEM).
- b. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan (KASI PEMBANGUNAN).
- c. Kepala Seksi Kemasyarakatan (KASI KEMASYARAKATAN)
- d. Kepala Urusan Perencanaan (KAUR PERENCANAAN)
- e. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEUANGAN)
- f. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

2.5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran terkait korelasi antar variabel pada suatu penelitian yang dijabarkan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis (idrus, 2009). *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mendukung hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan sektor bisnis, dan pemerintah dengan pemerintah. Tentu adanya inovasi tersebut menuntut kesiapan pemerintahan desa dalam mengupayakan penerapan *E-Government*, namun seringkali upaya menerapkan inovasi tersebut mengalami banyak hambatan dan kendala seperti kurangnya infrastruktur yang mumpuni dan sumber daya manusia yang kurang sehingga dalam penelitian ini memilih teori *E-Readiness* untuk digunakan menilai kesiapan penerapan *E-Government* berbasis *Website* di Desa Margototo dan Desa Margosari.

Teori tersebut dicetuskan oleh Richard Heeks dan banyak digunakan untuk menganalisa kesiapan penerapan *E-Government* di negara berkembang. Karena dalam upaya pengimplementasian *E-Government* banyak dijumpai hambatan, hal ini pun terjadi di Desa Margototo dan Desa Margosari walaupun kedua desa diketahui telah memiliki *website* dari tahun 2019 tetapi *website* tersebut masih belum dapat memberikan pelayanan secara digital hingga saat ini, selain itu dalam pengelolaan *website* di kedua desa tersebut

sangat berbeda. Yang mana ditemukan bahwa *website* desa margototo masih sedikit informasi yang diberikan sedangkan *website* Desa Margosari terlihat lebih informatif. Selain itu yang menarik adalah Desa Margosari merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Margototo, tetapi peneliti beramsumsi bahwa dalam kesiapan *E-Government* Desa Margototo sebagai Desa Induk terlihat nampak tertinggal dibandingkan Desa Margosari sebagai Desa hasil pemekaran, sehingga dalam penelitian ini akan membandingkan kesiapan penerapan *E-Government* pada pemerintahan desa berbasis *website* di Desa Margototo dan Desa Margosari.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.

Sumber: Diolah Oleh peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode pengumpulan data yang berdasarkan pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan suatu fenomena yang terjadi, dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Anggito dan Setiawan, 2018: 8), metode kualitatif merupakan usaha untuk menemukan dan menggambarkan secara deskriptif kegiatan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka dan strategi yang digunakan adalah dengan studi kasus dengan menyelidiki sebuah aktivitas atau peristiwa secara mendalam pada suatu fenomena.

Selain itu, digunakan juga pendekatan komparatif atau perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pada suatu fenomena. Pada pendekatan ini menggunakan bentuk komparatif MSS (*Most Similar System*) yang merupakan pendekatan perbandingan dengan ciri masalah yang serupa (Marsh, et al., 2021). Pendekatan ini digunakan karena mengingat bahwa pemerintahan Desa Margototo dan Desa Margosari dalam menggunakan *website* masih sebatas sebagai sistem informasi saja sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat *E-Government* di kedua desa tersebut masih di tahap persiapan

Lokus pada penelitian ini adalah dua desa yang berada Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung timur yakni Desa Margototo dan Desa Margosari yang masing-masing dari dua desa tersebut telah memiliki *website* desa dan fokus kajian penelitian ini adalah mengetahui kesiapan penerapan *E-Government* pada Pemerintahan Desa di Desa Margototo

dan Desa Margosari berdasarkan *website* yang dimiliki dengan menggunakan indikator E-Readiness Richard Heeks dalam (Indrajit,2006)

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini dilaksanakan di dua desa yaitu Desa Margototo Dan Desa Margosari yang terletak di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena merupakan lokasi sesuai dengan topik yang akan dibahas.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh, luasnya ruang lingkup penelitian termasuk juga hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat fokus dalam memahami permasalahan dalam penelitiannya. Fokus dalam penelitian ini adalah Kesiapan penerapan *E-government* pada pemerintahan desa di kedua desa yaitu Desa Margototo dan Desa Margosari yang diketahui bahwa *website* di kedua desa tersebut sama-sama belum masuk pada tahap pelayanan atau belum sampai pada tahap 3 dan 4 sehingga dalam menilai kesiapannya dinilai berdasarkan teori *E-Readiness* yaitu

1. Sistem Data, yaitu berfokus pada ketersediaan dokumen desa secara digital untuk mendukung penerapan E-Government berfokus pada basis data dan manajemen data.

2. Landasan Hukum, berfokus pada ketersediaan aturan, standar pelaksanaan bagi Pemerintah Desa untuk menerapkan *E-Government*.
3. Kelembagaan, adanya lembaga/badan atau tim yang dibentuk untuk mengkoordinir dan peran serta tugas yang jelas dalam menerapkan E-Government.
4. Sumber Daya Manusia, dalam hal ini berfokus dari ketersediaan SDM yang mumpuni dan ahli dibidang IT, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi, serta kesiapan masyarakat terhadap perubahan yang terjadi.
5. Infrastruktur Teknologi, berfokus pada komponen pendukung dalam kesiapan penerapan *E-Government* yang meliputi Perangkat Keras (*Hardware*) komputer yang mumpuni, Jaringan internet yang stabil, ketersediaan Perangkat Lunak (*Software*) meliputi sistem operasi, perangkat penyedia layanan desa..
6. Kepemimpinan dan Pemikiran yang Strategis, berfokus pada visi Kepala Desa untuk mewujudkan *E-Government*, kemampuan Kepala Desa dalam memotivasi dan mendorong dalam keberlanjutan *E-government*, serta adanya komunikasi antara kepala desa, aparatur dan masyarakat.

3.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu

I. Data Primer

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara secara mendalam dan dilakukannya observasi langsung oleh peneliti. Data primer diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi dengan para aparatur dan masyarakat baik di Desa Margototo maupun di Desa Margosari.

II. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung di peroleh dari informan di lapangan dan dapat diperoleh dalam dokumen-dokumen dan sebagainya. Dalam penelitian data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, buku, dokumen desa, dan sumber lainnya yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

3.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan dan sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Abdussamad,137:2021) bahwa informan ini mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti yakni mengenai Kesiapan Penerapan *E-Government* pada Pemerintahan Desa berbasis *website* di Desa Margototo dan Desa Margosari.

Tabel 4. Data Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Al-Qomarrudin	PJ Kepala Desa Margototo	1 Orang
2.	Antono	Sekretaris Desa Margototo	1 Orang
3.	Nurma Yunita	Operator Desa Margototo	1 Orang
4.	Suwardi	Kepala Desa Margosari	1 Orang
5.	Suranto	Sekretaris Desa Margosari	1 Orang
6.	Ulfa Lailatin	Operator Desa Margosari	1 Orang
7.	Masyarakat	Masyarakat Desa Margototo	4 Orang
8.	Masyarakat	Masyarakat Desa Margosari	4 Orang

Diolah Oleh Peneliti,2023

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang menuntut peneliti untuk mencari data langsung dilapangan, observasi juga berarti mengharuskan peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, peristiwa, benda-benda, dan tujuan hal ini tentu memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang mungkin saja tersembunyi dan tidak didapatkan saat wawancara. Observasi yang dilakukan oleh peneliti selama 3 bulan sejak bulan November-Januari melalui *website* desa dan Observasi secara langsung di Desa Margototo dan Desa Margosari yang bertujuan untuk melihat kondisi Pemerintah Desa Margototo maupun Pemerintah Desa Margosari dalam pemanfaatan website serta melihat secara langsung kondisi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan teori *E-Readiness*.

2) Wawancara

Menurut Kahn dan Cannel dalam Sarosa (2021:21) wawancara merupakan diskusi antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, dalam penelitian ini dilakukan wawancara yang mendalam mengenai Kesiapan penerapan *E-Government* pada *Website* Desa sebagai fokus penelitian. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu merupakan wawancara yang dilakukan dengan panduan wawancara dalam proses wawancara pertanyaan yang diajukan langsung pada poin permasalahan dan juga pengembangan topik dari pertanyaan yang diajukan dengan demikian dalam penggunaanya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam hal ini peneliti telah melakukan turun lapangan beberapa kali untuk melaksanakan wawancara dengan informan yang telah ditentukan berdasarkan tujuan dan kemanfaatan dari penelitian yang

dilakukan. Berikut dijabarkan terkait wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan:

1. Wawancara dilakukan pada Selasa 21 November 2023 dengan Ibu Nurma Yunita selaku Operator Desa Margototo pada pukul 09.00 WIB di SD Negeri 1 Margototo.
2. Wawancara dilakukan pada Rabu 22 November 2023 dengan Bapak Antono selaku Sekretaris Desa Margototo pada pukul 11.00 WIB dikediamanya.
3. Wawancara dilakukan pada hari Rabu 27 November 2023 dengan Bapak Al-Qomarrudin, S.I.P selaku Pejabat Kepala Desa Margototo pada pukul 09.30 WIB di Kantor Desa Margototo
4. Wawancara dilakukan pada hari Selasa 5 Desember 2023 dengan Bapak Suranto selaku Sekretaris Desa Margosari pada pukul 08.30 WIB di Kantor Desa Margosari.
5. Wawancara dilakukan pada Senin 11 Desember 2023 dengan Bapak Suwardi selaku Kepala Desa Margosari pada pukul 11.00 WIB di Kantor Desa Margosari.
6. Wawancara dilakukan pada hari Kamis 14 Desember 2023 dengan Ibu Ulfa Lailatin selaku Operator Desa Margosari pada pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Margosari.
7. Wawancara dilakukan hari Rabu 27 November dengan Ibu Risti selaku Masyarakat Desa Margototo Pukul 13.00 WIB di kediamannya.
8. Wawancara dilakukan hari Rabu 27 November dengan Novia selaku Masyarakat Desa Margototo pada pukul 15.00 WIB di kediamannya.
9. Wawancara dilakukan pada Kamis 14 Desember 2023 dengan Ibu Emi selaku Masyarakat Desa Margototo pada pukul 13.00 WIB di kediamannya.

10. Wawancara dilakukan pada Kamis 14 Desember 2023 dengan Ibu Sriatun selaku Masyarakat Desa Margototo pukul 14.30 WIB di kediamannya.
11. Wawancara dilakukan pada Senin 11 Desember 2023 dengan Ibu Mega Sari selaku Masyarakat Desa Margosari pada pukul 12.00 WIB di Taman Kanak-Kanak (TK) Margosari.
12. Wawancara dilakukan pada Senin 18 Desember 2023 Ibu Linda selaku Masyarakat Desa Margosari pada pukul 10.00 WIB di Pos Layanan terpadu (Posyandu) Desa Margosari.
13. Wawancara dilakukan pada Kamis 14 Desember 2023 dengan Ibu Wartini selaku Masyarakat Desa Margosari pada pukul 16.00 WIB di Taman Desa Margosari.
14. Wawancara dilakukan pada Kamis 14 Desember 2023 dengan Ibu Triasih selaku Masyarakat Desa Margosari pukul 17.00 WIB di SD Negeri Margosari.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bentuk dari dokumentasi ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumentasi dalam penelitian ini adalah dari foto tampilan *website* dari Desa Margototo dan Desa Margosari, handphone untuk keperluan *recording*, buku untuk keperluan mencatat hal penting untuk ditulis, dokumen desa berupa SK pengelola *website*, dokumen keuangan terkait anggaran penggunaan *website*, dan foto wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh tahap selanjutnya yaitu melakukan tahap pengolahan data. Dalam tahapan tersebut terdiri dari :

1) Editing Data

Editing data merupakan yang dilaksanakan dalam penelitian dengan memilih atau menentukan kembali dari data-data yang diperoleh dalam menjamin validitasnya dan untuk dipersiapkan pada tahap berikutnya. Dalam tahap ini peneliti melakukan pengolahan data hasil wawancara dengan menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan berfokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan, peneliti mengolah data hasil observasi yang menarik agar nanti dapat disajikan dengan baik.

2) Interpretasi Data

Pada tahap ini data yang telah di deskripsikan baik dalam bentuk narasi ataupun tabel akan diinterpretasikan agar dapat ditarik kesimpulan.

3.8. Teknik Analisis Data

Adapun beberapa teknik pengambilan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1) Reduksi Data

Merupakan proses memilih data yang diperoleh, dan memilih data yang penting saja sebab semakin lama peneliti berada dilapangan maka makin banyak data yang diperoleh sehingga diperlukan untuk menganalisis dengan mereduksi data-data tersebut agar memfokuskan pada hal yang penting dan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan informasi yang telah disusun yang kemudian dapat dilakukan penarikan kesimpulan, dalam penelitian ini penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori dan sejenisnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memahami terkait permasalahan atau fenomena yang diteliti.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, pada awalnya kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara apabila kesimpulan tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat setelah dilakukannya tahap pengumpulan data maka kesimpulan itu dapat berubah, tetapi apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat pengambilan data di lapangan pada tahap berikutnya maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Demikian dalam hal ini, peneliti berusaha dan berharap kesimpulan yang telah dibuat dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal berkaitan dengan kesiapan penerapan *E-Government* pada pemerintahan desa berbasis *website* pada pemerintah Desa Margototo dan Desa Margosari.

3.9. Teknik Validasi Data

Dalam penelitian ini teknik validasi data yang digunakan yaitu dengan metode triangulasi data. Triangulasi data artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh sumber yang sama. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data untuk pengecekan data atau sebagai pembanding., dalam metode ini paling banyak digunakan adalah dengan cara mengecek dengan sumber lain. Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi teknik dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan peneliti dapat disimpulkan terkait kesiapan penerapan *E-Government* berbasis *website* di Pemerintah Desa Margototo dan dan Pemerintah Desa Margosari berdasarkan 6 Indikator *E-Readiness* bahwa:

1. Pada Pemerintah Desa Margototo hanya siap pada 1 indikator kesiapan yakni infrastruktur teknologi yang dibuktikannya dengan sudah adanya akses internet yang memadai di Desa, adanya pusat internet pada Kantor Desa dengan menginstalasi *wifi* , sudah disiapkan perangkat *software* dan *hardware* yang meliputi komputer, PC, dan Monitor yang sudah tersedia pada Kantor Desa, serta sudah disiapkan anggaran yang digunakan untuk pengembangan dan *maintenance website* pada setiap tahunnya. Ketidaksiapan terlihat pada belum tersedianya sistem data yang mendukung E-Government akibat kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan data, landasan hukum yang kurang mendukung secara materi bagi desa yang kurang berpotensi untuk menerapkan sehingga adanya kesenjangan diantara desa-desa yang menerapkan dan untuk menerapkan E-Government, pembentukan unit/lembaga yang mengkoordinir kurang efektif dalam mendukung E-Government, kurangnya ketersediaan, pengetahuan, dan keterampilan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa terkait pemanfaatan *website* serta penggunaan teknologi informasi, pada sisi masyarakat kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat untuk menggunakan *E-Government*, dan belum terlihatnya langkah strategis yang dilakukan Kepala Desa untuk mengatasi permasalahan yang menjadi kendala Pemerintah Desa Margototo untuk menerapkan *E-Government*.

2. Sementara pada pemerintah Desa Margosari siap menerapkan *E-Government* walaupun tidak maksimal, berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa Pemerintah Desa Margosari siap pada sebagian indikator yang terlihat pada tersedianya sistem data yang mendukung untuk penerapan *E-Government*, sudah disiapkan 7 orang pengelola website, antusias dan kesadaran masyarakat terkait manfaat *E-Government* dipersiapkan perangkat yang mendukung, pusat internet di 4 titik berbeda di Desa, dan kepemimpinan serta langkah strategis dari Kepala Desa untuk mendukung penerapan *E-Government* dengan metode yang mudah dipahami terutama bagi masyarakat. Pada hal lain diperoleh hasil bahwa terkait infrastruktur pada *website* Pemerintah Desa Margosari saat ini dalam keadaan eror sehingga tidak dapat diakses dalam jangka waktu yang lama dan belum adanya penanganan dari pihak Pemerintah Kabupaten. Permasalahan terlihat pada indikator yang sama yaitu landasan hukum dan kelembagaan memiliki permasalahan yang sama pada Desa Margototo yaitu kurangnya dukungan dari kebijakan dan pendampingan dari unit yang dibentuk untuk mengkoordinir pelaksanaan *E-Government* di tingkat Desa.

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Margototo untuk siap menerapkan *E-Government* dapat dengan menyiapkan sistem data untuk menyokong *E-Government* dengan membentuk *database* desa menggunakan bantuan perangkat lain sehingga memudahkan dalam pengintegrasian data/dokumen desa pada website, menambah pengelola *website* agar dapat maksimal dan untuk meningkat keterampilan serta pengetahuan dapat dengan melakukan kerja sama dengan lembaga atau bada yang ahli dibidang IT untuk melakukan bimtek atau pelatihan tambahan untuk aparatur desa, perlu dilakukannya sosialisasi pentingnya *E-Government* kepada masyarakat agar adanya kesadaran dan antusias masyarakat untuk mendukung *E-Government*.

2. Pada Pemerintah Desa Margosari untuk dapat menerapkan *E-Government* dapat dengan melakukan tindakan perbaikan serta pemulihan website yang eror dengan mengidentifikasi permasalahan serta melakukan pemeliharaan sistem agar website dapat digunakan kembali.
3. Permasalahan yang sama sangat terlihat pada Pemerintah Desa Margototo maupun pada Pemerintah Desa Margosari terkait landasan hukum dan Kelembagaan, maka bagi pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten semestinya memberikan kebijakan/aturan yang mendukung desa-desa yang kurang berpotensi untuk menerapkan *E-Government* dengan menyesuaikan keadaan dan kemampuan desa. Terkait kelembagaan bagi Unit/lembaga yang dibentuk tidak hanya mengkoordinir tetapi dapat dengan memberikan pendampingan secara langsung bagi desa sehingga lebih efektif dan efisien dalam membantu desa menerapkan *E-Government*.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif* (E. Deffi Lestari, Ed.; 1st ed.). CV Jejak.
- Atmajaya, D.G, & Wirata, G. 2021. *Peranan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring*. Jurnal widyanata, 18(1), 1-11.
- Gilang, O., & Pangaribowo, G. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi di Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)*. Retrieved September 20, 2023, from <http://digilib.unila.ac.id>
- Herlambang Cahya, A. 2019. *Pengukuran PENGUKURAN LEADERSHIP DALAM KEBERHASILAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (Studi Kasus di Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten trenggalek)*. Retrieved January 22, 2024, From <Http://Repository.its.ac.id>
- Hidayatullah, S. (2021). *Teknologi Informasi dan Komunikasi* (S. Hidayatullah, Ed.; 1st ed.). TareBooks.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga.
- Ilham. 2021. *E-Governance* (M. Muarif, Ed.; 1st ed.). Depublish Publisher.
- Indrajit, R. E., Rudianto, D., & Zainuddin, A. 2006. *e-Government in Action* (1st ed.). ANDI Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. No. 3 2003.
- Isman, H. *VILLAGE GOVERNMENT CAPACITY IN MANAGEMENT OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN TELUK PANDAN DISTRICT, PESAWARAN REGENCY*. Retrieved August 24, 2023, from <http://digilib.unila.ac.id>
- Fitriana, M. 2021. *EVALUASI FORMULASI KEBIJAKAN SMART VILLAGE PROPINSI LAMPUNG*. Retrived February 23, 2024, from <http://digilib.unila.ac.id>
- Mariani. 2021. *potret pelayanan publik Pemerintahan Desa*. <Https://ombudsman.go.id>, diakses pada 3 Oktober 2023

- Marsh, D., Stoker, G., Mahadi, H., & Shohifullah. 2021. *Metode Komparatif* (2nd ed.). Nusamedia.
- Mayowan.,Y. 2019. *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)*.Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 10 (1) Hal 14-23.
- Monografi Pemerintah Desa Margosari Tahun 2022.
- Nasrullah Jamaludin, A. (n.d.). *Sosiologi Perdesaan*.
- Ngajiyanto, & Muntikasari, E. 2014. *Sistem Informasi E-Desa (Studi Kasus Desa Margototo)*. Jurnal Informasi Dan Komputer.
- Nur Hakim, M.A. 2014. *Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntansi Sistem Pemerintahan Modern*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 03 (1), Hal 410.
- Rahmadi, L. 2013. *Tips Membuat Website Tanpa Coding dan Langsung*. CV Andi Yogyakarta.
- Rusito. 2021.*Teknologi Internet IoT (Internet of Thing) dalam Bahasa HTML*.YPAT
- Sarosa, S. 2021. *Analisi Data Penelitian Kualitatif* (F. Maharani, Ed.; 1st ed.). PT Kanisius.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa.
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Program Desa Berjaya.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. No. 22, Jakarta 2023.
- Profil Pemerintah Desa Margototo Tahun 2021.
- Profil Pemerintah Desa Margosari 2022.

- Prisanda, E., & Febrina, R. 2021. *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village*
- Rahardjo, B. (2005). *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*.
<http://budi.insan.co.id/courses/el695>
- Rahmawati, W., & Arwaningtyas, Z. 2020. *Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk E-Government di Desa Girikerto*. *Jurnal Dinamika Informatika*, 143-147.
- Subhan, & Budi Pratama, A. (2019). *Kesiapan Desa Dalam Penerapan E-Government (Studi Perbandingan di desa semaya dan desa pegiringan Kabupaten Pematang)*.
- Suryandari, K.A., & Utami, A. 2022. *Analisis Peran Perangkat Desa Dalam Penerapan Website Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Wacana Publik*, Vol 16, Hal 1-7.
- Surat Keputusan Menteri Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta 2023.
- Toots, M. 2019, *Why E-Participation Systems Fail: The Case Of Estonia's*, *Government Information Quarterly*, Vol 36 (3) Page 546-559.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2014.
- Website Desa Margototo. <https://Margototo-desasari.id>, diakses pada 19 September 2023
- Website Desa Margosari. <https://Margosari-desasari.id>, diakses pada 26 Agustus 2023
- Website E-Government Survey. <https://Publicadministration.un.org> diakses pada 16 Agustus 2023
- Website Pemerintahan Kabupaten Lampung timur. <https://lampungtimurkab.go.id> diakses pada 08 Oktober 2023